

PENGARUH SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BUNGO

Afdhal Chatra, Yenni¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci¹

afdhalchatra@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian government policy on regional autonomy, which began to be implemented effective on January 1, 2001 since the promulgation of Law No. 22 of 1999 which last revised by Act number 23 of 2014, a policy that is seen as a democratic and fulfilling aspects of decentralization of government real, Decentralization alone has the objective to improve the welfare and service to the community, the development of democratic life, justice, equity, and the maintenance of harmonious relations between the center and regions as well as between daerah. This study aims to examine the Original Regional Revenue on Regional Expenditure in Bungo District Year 2006-2014. The result of the research shows that there is a positive and significant influence between the sources of Local Original Income (X1, X2, X3, X4) on local expenditure (Y) in Bungo District. The amount of influence simultaneously between sources of Original Revenue (X1, X2, X3, X4) to local expenditure (Y) in Bungo District is shown with the value of R² is 99.40%.

Keywords: Local Revenue, Regional Expenditure

ABSTRAK

Otonomi daerah di Indonesia, mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001 sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang terakhir direvisi dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, merupakan kebijakan yang dipandang secara demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bungo Tahun 2006-2014. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah(X1,X2,X3,X4) terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Bungo. Besarnya pengaruh secara simultan antara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah(X1,X2,X3,X4) terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Bungo ditunjukkan dengan nilai R² nya sebesar 99.40%.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah , Belanja Daerah*

Detail Artikel :

Diterima : 21 September 2016

Disetujui : 05 Oktober 2016

[DOI : 10.22216/jbe.v2i2.953](https://doi.org/10.22216/jbe.v2i2.953)

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001 sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang terakhir direvisi dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, merupakan kebijakan yang dipandang secara demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 sebesar 18,68%, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 17,47%. Namun demikian apakah realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat mempengaruhi kebutuhan belanja pemerintah Kabupaten Bungo.

Begitu juga dengan belanja daerah Kabupaten Bungo juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 pertumbuhan realisasi belanja daerah meningkat sebesar 72,64% dari tahun 2006. Pada tahun 2008 pertumbuhan realisasi belanja daerah meningkat sebesar 20,72%. Pada tahun 2009 pertumbuhan realisasi belanja daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 8,54%. Pada tahun 2010 pertumbuhan realisasi belanja daerah meningkat sebesar 8,38%. Secara rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah dari tahun 2006 sampai dengan 2014 meningkat sebesar 17,47%.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo tahun 2006 – 2014 secara parsial.
2. Mengetahui besarnya pengaruh sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo tahun 2006 – 2014 secara parsial.
3. Mengetahui pengaruh sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo tahun 2006 – 2014 secara simultan.
4. Mengetahui besarnya pengaruh sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo tahun 2006 – 2014 secara simultan.

METODE PENELITIAN

Regresi linier berganda digunakan untuk menghitung pengaruh secara simultan antara sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo. Rumus yang digunakan mengacu pada Riduwan (2007:95) sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana,

- Y = Belanja Daerah
- X1 = Pajak Daerah
- X2 = Retribusi Daerah
- X3 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- X4 = Lain-lain PAD Yang Sah
- a = Konstanta
- b = Koefisien korelasi
- e = error

Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo, maka digunakan rumus koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ho: $r = 0$, diduga tidak terdapat pengaruh sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo.

Ha: $r \neq 0$, diduga terdapat pengaruh sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo.

Uji Hipotesis

Uji t

Uji-t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh secara parsial antara sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo.

Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi: $\alpha = 0,05$ atau 5% untuk uji 2 (dua) arah dan $df = n - k$. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara hasil perhitungan t-hitung dengan t-tabel.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t-hitung = Nilai t-hitung

r = Nilai koefisien regresi

n = Jumlah periode waktu

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_a diterima H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo.

Uji-F

Uji-F adalah uji hipotesis yang dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan antara sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$F\text{-hitung} = \frac{R^2 (n - k - 1)}{m (1 - R^2)}$$

Kriteria:

$F_{hitung} < F_{tabel}$:

H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo secara simultan.

$F_{hitung} \geq F_{tabel}$:

H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo secara simultan.

Untuk melakukan perhitungan agar hasilnya lebih akurat, maka digunakan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini dapat dilihat perkembangan realisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo dari tahun 2006 sampai dengan 2014

Tabel 1
Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Bungo Tahun 2006 – 2014

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Rp)	Lain-lain PAD Yang Sah (Rp)
2006	2.823.208.170,00	16.304.604.570,00	1.729.270.010,00	7.807.431.960,00
2007	2.415.015.500,00	24.041.756.850,09	1.328.564.800,00	10.802.003.000,00
2008	2.956.018.000,00	24.215.271.790,10	2.852.816.178,89	17.784.039.609,90
2009	3.513.688.188,00	5.535.474.045,00	4.568.601.318,58	28.643.657.443,68
2010	5.547.552.053,00	5.986.418.425,00	5.068.601.318,58	35.880.707.661,44
2011	9.781.993.500,00	3.865.802.405,00	8.295.917.671,00	45.808.898.630,00
2012	10.484.500.000,00	4.881.591.905,00	4.943.191.899,00	51.383.829.130,00
2013	14.952.468.392,00	6.443.653.347,00	7.000.000.000,00	66.919.586.717,00
2014	20.848.539.107,00	9.101.052.002,00	4.323.526.826,00	71.033.920.860,00
Jumlah	69.809.294.722,00	94.840.151.294,19	35.541.888.703,47	289.636.377.958,44
Rata-rata	7.756.588.302,44	10.537.794.588,24	3.949.098.744,83	32.181.819.773,16

Sumber: www.bpskabupatenbungo.go.id

Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa secara nominal realisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Bungo dari tahun 2006 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi. Untuk pajak daerah, rata-rata realisasi per-tahun sebesar Rp.7.756.588.302,44.

Rata-rata realisasi retribusi daerah per-tahun sebesar Rp.10.537.794.588,24. Rata-rata realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per-tahun sebesar Rp.3.949.098.744,83 dan rata-rata realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah per-tahun sebesar Rp.32.181.819.773,16.

Realisasi Belanja Daerah

Berikut ini dapat dilihat perkembangan realisasi dan pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Bungo dari tahun 2006 – 2014.

Tabel 2
Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006 – 2014

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2006	326.360.078.060,00	-
2007	563.432.028.929,73	72,64
2008	680.186.955.330,57	20,72
2009	622.100.727.167,47	-8,54
2010	674.259.918.924,03	8,38
2011	744.999.647.156,00	10,49
2012	833.136.949.502,35	11,83
2013	1.051.265.384.035,03	26,18
2014	1.030.543.849.697,43	-1,97
Jumlah	6.526.285.538.800,61	139,74
Rata-rata	725.142.837.644,51	17,47

Sumber: Data diolah.

Dari tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa persentase pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Bungo dari tahun 2006 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 pertumbuhan realisasi belanja daerah meningkat sebesar 72,64%. Pada tahun 2008 pertumbuhan realisasi belanja daerah meningkat sebesar 20,72% dan pada tahun 2009 persentase pertumbuhan realisasi belanja daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 8,54%. Tapi pada tahun 2010 persentase pertumbuhan realisasi belanja daerah kembali mengalami peningkatan sebesar 8,38%. Pada tahun 2014 persentase pertumbuhan belanja daerah mengalami penurunan yang negatif yaitu sebesar -1,97%.

Secara rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah selama 9 (sembilan) tahun terakhir meningkat sebesar 17,47%. Pengaruh Sumber-Sumber PAD Terhadap Belanja Daerah Secara Parsial

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan data sebagaimana dijelaskan pada tabel 1. dan 2 , maka pada tabel berikut ini dapat dilihat hasil perhitungan regresi linier sederhana yaitu pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo tahun 2006 – 2014. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 20.

Tabel 3
Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bungo Tahun 2006-2014
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	473082.534	64668.475		7.316	.000	320165.890	625999.178
Pjk.Daerah	30.939	6.363	.878	4.862	.002	15.892	45.986

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data diolah.

Dari tabel 4 dapat dijelaskan bahwa pada tingkat signifikansi 0,05 dan $df_2 = n - k$ atau $9 - 2 = 7$, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,364. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier di atas, maka $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $4,862 > 2,364$. Dengan demikian maka

H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo tahun 2006-2014.

Tabel 4
Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bungo Tahun 2006-2014
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	453274.902	146967.143		3.084	.018	105752.832	800796.972
Hasil BUMD	61.002	29.698	.613	2.054	.079	-9.223	131.227

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa pada tingkat signifikansi 0,05 dan $df_2 = n - k$ atau $9 - 2 = 7$, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,364. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier di atas, maka $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $2,054 < 2,364$. Dengan demikian maka H_a

ditolak dan Ho diterima, artinya bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo.

Pengaruh Lain-lain PAD Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo tahun 2006-2014.

Tabel 5
Pengaruh Lain-lain PAD Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bungo Tahun 2006-2014
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	383045.862	55602.273				
	Lain-lain PAD	9.162	1.284	.938	7.133	.000	6.124 12.199

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa pada tingkat signifikansi 0,05 dan $df_2 = n - k$ atau $9 - 2 = 7$, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,364. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier di atas, maka t-hitung > t-tabel atau $7,133 > 2,364$. Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo.

Besarnya Pengaruh Sumber-Sumber PAD Terhadap Belanja Daerah Secara Parsial Besarnya Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo, maka berikut ini dapat dilihat hasil perhitungan koefisien determinasi.

Tabel 6
Besarnya Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bungo Tahun 2006-2014
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.878 ^a	.772	.739	115972.06923	.772	23.640	1	7	.002

a. Predictors: (Constant), Pjk.Daerah

Sumber: Data diolah

Dari tabel 6 dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi antara pajak daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo ditunjukkan oleh nilai pada kolom R yaitu sebesar 0,878. Untuk mengetahui besarnya pengaruh maka dapat dilihat nilai pada kolom R-Square yang dikalikan dengan 100%. Dengan demikian maka besarnya pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo adalah sebesar 77,20%, sedangkan sisanya sebesar 22,80% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Besarnya Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo, maka berikut ini dapat dilihat hasil perhitungan koefisien determinasi

Tabel 7

Besarnya Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bungo Tahun 2006-2014

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			
						F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.460 ^a	.212	.099	215400.05235	.212	1.882	1	7	.212

a. Predictors: (Constant), Ret.Daerah

Sumber: Data diolah

Dari tabel 7 dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi antara retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo ditunjukkan oleh nilai pada kolom R yaitu sebesar 0,460. Untuk mengetahui besarnya pengaruh maka dapat dilihat nilai pada kolom R-Square yang dikalikan dengan 100%. Dengan demikian maka besarnya pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo adalah sebesar 21,20%, sedangkan sisanya sebesar 78,80% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Besarnya Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Belanja Daerah. Untuk mengetahui besarnya pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo, maka berikut ini dapat dilihat hasil perhitungan koefisien determinasi.

Tabel 8

Besarnya Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bungo Tahun 2006-2014

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			
						F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.613 ^a	.376	.287	191652.62704	.376	4.219	1	7	.079

a. Predictors: (Constant), Hasil BUMD

Sumber: Data diolah

Dari tabel 8 dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi antara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo ditunjukkan oleh nilai pada kolom R yaitu sebesar 0,613. Untuk mengetahui besarnya pengaruh maka dapat dilihat nilai pada kolom R-Square yang dikalikan dengan 100%.

Dengan demikian maka besarnya pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo adalah sebesar 37,60%, sedangkan sisanya sebesar 62,40% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Besarnya Pengaruh Lain-lain PAD Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Untuk mengetahui besarnya pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo, maka berikut ini dapat dilihat hasil perhitungan koefisien determinasi.

Tabel 9

Besarnya Pengaruh Lain-lain PAD Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bungo Tahun 2006-2014

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			
						F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.938 ^a	.879	.862	84383.42079	.879	50.873	1	7	.000

a. Predictors: (Constant), Lain-lain PAD

Sumber: Data diolah

Dari tabel 9 dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi antara lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo ditunjukkan oleh nilai pada kolom R yaitu sebesar

0,938. Untuk mengetahui besarnya pengaruh maka dapat dilihat nilai pada kolom R-Square yang dikalikan dengan 100%. Dengan demikian maka besarnya pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo adalah sebesar 87,90%, sedangkan sisanya sebesar 12,10% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Sumber-Sumber PAD Terhadap Belanja Daerah Secara Simultan

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh sumber-sumber PAD terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo secara simultan dari tahun 2006 sampai dengan 2014.

Tabel 10.
Pengaruh Sumber-Sumber PAD Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bungo Secara Simultan Tahun 2006 – 2014

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	409519836025.091	4	102379959006.273	159.425	.000 ^b
Residual	2568727549.676	4	642181887.419		
Total	412088563574.766	8			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Lain-lain PAD, Ret.Daerah, Hasil BUMD, Pjk. Daerah

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 10 maka dapat diketahui bahwa hasil perhitungan uji F-hitung diperoleh sebesar 159,425. Dengan tingkat signifikansi 0,05 dan $df_2 = n - k - 1$ atau $9 - 4 - 1 = 4$, maka diperoleh F-tabel sebesar 6,94. Dengan demikian maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($159,425 > 6,94$) dan signifikansi $< 5\%$ ($0,000 < 0,05$), artinya bahwa secara simultan sumber-sumber PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo Tahun 2006 – 2014. Besarnya Pengaruh Sumber-sumber PAD Terhadap Belanja Daerah Secara Simultan Untuk mengetahui besarnya pengaruh sumber-sumber PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bungo maka berikut ini dapat dilihat hasil perhitungan koefisien determinasi.

Tabel 11
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Sig. F Change	
					R Square Change	F Change	df1		df2
1	.997 ^a	.994	.988	25341.30793	.994	159.425	4	4	.000

a. Predictors: (Constant), Lain-lain PAD, Ret.Daerah, Hasil BUMD, Pjk. Daerah

Sumber: Data diolah

Dari tabel 11 dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi antara sumber-sumber PAD terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo ditunjukkan oleh nilai pada kolom R yaitu sebesar 0,997. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sumber-sumber PAD terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo maka dapat dilihat nilai pada kolom R-Square yang dikalikan dengan 100%. Dengan demikian maka besarnya pengaruh sumber-sumber PAD terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo secara simultan adalah sebesar 99,40%, sedangkan sisanya sebesar 0,60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Secara parsial, pajak daerah(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Bungo. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan t-hitung sebesar 4,862 lebih besar dibandingkan dengan t-tabel sebesar 2,364 atau ($4,862 > 2,364$). Retribusi daerah(X2) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Bungo. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan t-hitung sebesar -1,372 lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel sebesar -

2,364 atau $(-1,372 < 2,364)$. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan(X3) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Bungo. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan t-hitung sebesar 2,054 lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel sebesar 2,364 atau $(2,054 < 2,364)$. Lain-lain PAD yang sah(X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Bungo. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan t-hitung sebesar 6,584 lebih besar dibandingkan dengan t-tabel sebesar 7,133 atau $(7,133 > 2,364)$.

Secara parsial, besarnya pengaruh pajak daerah(X1) terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Bungo adalah 77,20% dan sisanya 22,80% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Besarnya pengaruh retribusi daerah(X2) terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Bungo adalah 21,20% dan sisanya 78,80% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Besarnya pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah(X3) terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Bungo adalah 37,60% dan sisanya 62,40% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Besarnya pengaruh lain-lain PAD yang sah(X4) terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Bungo adalah 87,90% dan sisanya 12,10% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah(X1,X2,X3,X4) terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Bungo. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan F-hitung yang dibandingkan dengan F-tabel. Nilai F-hitung $>$ F-tabel atau $159,425 > 6,94$. Artinya bahwa secara simultan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bungo. Besarnya pengaruh secara simultan antara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah(X1,X2,X3,X4) terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Bungo adalah 99,40%. Sedangkan sisanya sebesar 0,60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Halim, 2003, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2, November.
- Alfian *Lains*, 2007, *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*, Penerbit Prisma, Jakarta.
- Hendri Edison dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir.
- Koswara, E, 2000, "Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya", CSISXXIX Nomor 1, Jakarta
- Kaho, Yosef Riwu, 2007, *Otonomi Daerah*, Penerbit PT. Rajagrafindo Perkasa, Jakarta.
- Mamesah, D, J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Penerbit Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta.

Prakoso, Kesit Bambang. 2004. Analisis pengaruh dana alokasi umum (dau) dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap prediksi belanja daerah (studi empiris di wilayah propinsi jawa tengah dan diy). Vol 8 No 2.

Pamudji. 2007. Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bina Aksara, Jakarta.

Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung. Universitas Sumatera Utara: Medan.

Riduwan, 2007. Pengantar Statistika. Untuk penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Gahalia Indonesia.

Suryana. 2003. *Ekonomi Pembangunan*, Problematika dan Pendekatan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Subowo dan Endar Rosita Wati, 2014 “Hubungan Antara PAD Dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus”. Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol. 2

Riduwan & Akdon. 2009. Rumus dan Data dalam Analisis Statistika. Bandung: Alfabeta.

Yuliarti, 2003, Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Indonesia: Suatu Studi Eksploratif mengenai Kebutuhan dan Permintaan Stakeholder akan Informasi Keuangan Pemerintah”, Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

_____ Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

_____ Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

_____ Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____ Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.